

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH

Sitti Retno Faridatussalam

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
srf122@ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dari pemerintahan Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018. Metode dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, analisis efektivitas PAD, rasio ketergantungan daerah, growth dan share. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kabupaten karanganyar memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain pemerintah kabupaten karanganyar sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

Kata kunci: *kemandirian keuangan daerah, analisis rasio dan kinerja keuangan*

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the financial performance of Karanganyar government in 2014-2018. The method in this research uses quantitative descriptive where the data used are secondary data. The financial performance and financial capacity analysis were carried out using ratio analysis such as fiscal decentralization capacity, independence ratio, effectivity analysis of local own-source revenue, dependency ratio, growth and share. The study concluded that financial independence ratio of Karanganyar regency has a high degree of dependence with the central government, on the other hand the government of Karanganyar regency was deemed very effective in realizing its own-source revenue.

Keywords: *regional financial independence, ratio analysis and financial performance*

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Selain itu, salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah

desentralisasi. Menurut UU No.32 tahun 2004, definisi dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh kepada daerah otonom untuk mengatur dan menurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Kabupaten Karanganyar mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelolah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat kabupten Karanganyar sendiri.

Pelaksanaan desentralisasi fisik oleh pemerintah daerah yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) dengan menggunakan analisis kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, analisis efektivitas PAD, dan rasio ketergantungan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan menggunakan analisis rasio seperti derajat desentralisasi fiskal, rasio

kemandirian, analisis efektivitas PAD, rasio ketergantungan daerah, *growth*, dan *share*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambar fenomena secara detail.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar dikarenakan wabah pandemic COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan PSBB kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari publikasi APBD kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi informasi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data APBD Kabupaten Karanganyar dalam angka periode 2014-2018.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian adalah dengan cara seperti melakukan dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengcopy atau mencatat dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait masalah yang diteliti.

Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran pemerintah daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

1) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi digunakan untuk menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah, dan menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Formula derajat desentralisasi adalah sebagai berikut (Reksohadiprojo, melalui Pramono.J)

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Nilai Derajat Desentralisasi	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Reksohadiprojo (2004)

- 2) Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Formula rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Tabel Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan Daerah

Nilai Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 - 25	Rendah Sekali	Instruktif
25 - 50	Rendah	Konsultatif
50 - 75	Sedang	Partisipatif
75 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2012

- 3) Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Formula efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010;142)

- 4) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Fisipol UGM yang bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri tahun 1991 (Tan, 2010), maka formula rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Nilai Rasio Ketergantungan	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Litbang Depdagri

- 5) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Analisis ini menggunakan perhitungan kinerja PAD melalui ukuran Grwoth dan Share, yang kemudian diklarifikasikan melalui pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

- a) Growth
Untuk mengukur besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Formula *growth* adalah sebagai berikut:

$$Growth = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

- b) Share
Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan serta untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Tabel 5. Tabel Peta keuangan Daerah

Kuadran II: shere rendah sedangkan growth tinggi	Kuadran I: shere dan growth sama-sama tinggi
Kuadran IV: shere dan growth sama-sama rendah	Kuadran III: shere tinggi sedangkan growth rendah

Hasil Dan Pembahasan

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Karanganyar relatif rendah, mengalami peningkatan pada tahun 2017 tetapi turun lagi pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih relatif kecil .

Tabel 6. Derajat Desentralisasi Kabupaten Karanganyar 2014-2018

Tahun	Derajat Desentralisasi (%)	Tingkat Desentralisasi Fisikal
2014	13,32	Kurang
2015	13,92	Kurang
2016	14,97	Kurang
2017	20,31	Sedang
2018	16,23	kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Berdasarkan Tabel 7, rasio kemandirian Kabupaten Karanganyar relatif kecil sehingga kabupaten karanganyar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dikarenakan jumlah yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan kecil.

Tabel 7. Rasio Kemandirian Kabupaten Karanganyar 2014-2018

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2014	22,52	Instruktif
2015	24,45	Instruktif
2016	21,67	Instruktif
2017	32,65	Konsultatif
2018	25,88	Konsultatif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar

Analisis Efektifitas PAD Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat rasio efektivitas dari table di bawah bahwa pertumbuhan rasio tertinggi ada di tahun 2017 dan yang paling rendah ada pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten karanganyar dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan.

Tabel 8. Analisis Efektifitas PAD

Tahun	Presentase	Kriteria
2014	110,24	Sangat Efektif
2015	85,68	Kurang Efektif
2016	100,28	Sangat Efektif
2017	104,52	Sangat Efektif
2018	102,93	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar

Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat dari table ratio

ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dari tahun ketahun semakin tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten karanganyar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

Tabel 9. Rasio ketergantungan Daerah Kabupaten Karanganyar 2014-2018

Tahun	Presentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
2014	59,13	Sangat Tinggi
2015	56,25	Sangat Tinggi
2016	69,08	Sangat Tinggi
2017	62,22	Sangat Tinggi
2018	62,71	Sangat Tinggi

Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar

Tabel 10. Growth dan Share Kabupaten Karanganyar 2014-2018

Tahun	Growth (%)	Share (%)
2014	33,13	13,37
2015	18,64	14,38
2016	17,93	14,44
2017	37,78	20,08
2018	-17,34	16,62

Sumber: BPPKAD Kabupaten Karanganyar

Dari tabel di atas *growth* dan *share* kabupaten karanganyar dilihat dengan menggunakan peta kemampuan keuangan daerah menunjukkan kuadran II pada tahun 2018 *growth* lebih rendah dibandingkan *share*. Posisi Kuadran II ini menunjukkan bahwa kondisi masih belum ideal, akan tetapi menunjukkan bahwa daerah memiliki

kemampuan yang cukup bagus untuk mengembangkan potensi lokalnya, yang berdampak PAD bisa mempunyai andil yang besar dalam APBD.

Penutup

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan kinerja pengelolaan Kabupaten Karanganyar berdasarkan rasio keuangan adalah kurang baik. Pola hubungan kemandirian daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola hubungan konsulatif dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sementara itu efektivitas keuangan daerah baik atau efektif, melampaui target yang telah ditetapkan, namun peningkatan pendapatan asli daerah perlu diperhatikan karena kontribusi pendapatan asli daerah mesih relatif kecil.

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Karanganyar, maka saran yang mungkin bermanfaat bagi pertumbuhan kekonomi Kabupaten Katanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupataen Karanganyar harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
- 2) Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian dan untuk menarik investor.

Referensi

- Atmoko.C, 2014 , BI : Kajian Regional Untuk Ukur Perekonomian Nasional. Antara News.com
- Halim, Abdul. 2012 Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Kemenkeu. 2014. APBD 2014 Kab. Karanganyar. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diakses 3 Juni)
- Kemenkeu. 2015 APBD 2015 Kab. Karanganyar. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diakses 3 Juni)

- Kemenkeu. 2016 APBD 2016 Kab. Karanganyar. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diakses 3 Juni)
- Kemenkeu. 2017 APBD 2017 Kab. Karanganyar. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diakses 3 Juni)
- Kemenkeu. 2018 APBD 2018 Kab. Karanganyar. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diakses 3 Juni)
- Machsum, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta
- Moullin, M. 2007. Improving and Evaluating Performance with The Public Sector Scorecard. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol.66 ISS 4pp
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 2018. APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. <http://www.karanganyarkab.go.id/tag/apbd/> (diakses 3 Juni)
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*. Vol.7 No.13:82-112.
- Rahmayati, A, 2016, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, tahun 2011-2013. *Jurnal Eka Cida*. Vol.1 No.1 Maret 2016. ISSN : 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689
- Ramadhani, F, 2016, Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan tahun 2010/2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.14, No.01 Juni 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sandi, I Wayan, Fridayana, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Vol.4 tahun 2016
- Sumardi dan Dwi Prasetyani, 2011 , Analisis Kinerja dan Potensi Pendapatan Asli Daerah, Cetakan 1, CakraBooks Solo.
- Tan, Syamsudijal , 2010, Perencanaan Pembangunan – Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi Jambi, Jambi.
- Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah